

## **ANALISIS PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI SMP N 2 BOJA KENDAL**

Scripzyan Meifany Ariyadi Norma Kartono<sup>1</sup>, Ariyah<sup>2</sup>, Vina Okta Viana<sup>3</sup>, Nur Kolis<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Universitas PGRI Semarang

[1scriipz7088@gmail.com](mailto:scriipz7088@gmail.com), [2ariyahardi@gmail.com](mailto:ariyahardi@gmail.com)  
[vina20oktaviana@gmail.com](mailto:vina20oktaviana@gmail.com), [nurkolis@upgris.ac.id](mailto:nurkolis@upgris.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This research aims 1) to determine and analyze the role of school committees in planning education financing 2) to determine and analyze the role of school committees in implementing education financing 3) to determine and analyze the role of school committees in monitoring education financing 4) to determine and analyze the obstacles that arise faced by the SMPN 2 Boja Kendal school committee in financing education. This type of research is a case study. Data collection used in this research took the form of observing activities, interviews and searching for financial documents. This research uses triangulation of sources and methods. Data analysis in three steps: data reduction, presenting data, and drawing conclusions. The results of the research are 1) the role of committees in planning by being involved in accommodating school programs that are not funded by the APBN and APBD, as well as socializing school programs. 2) the role of the committee in implementing financing by raising funds and managing funds. 3) the role of the school committee in supervising the committee in supervising educational services and following up on criticism and suggestions or aspirations from students, parents/guardians and the community is not yet optimal. 4) The main obstacle faced by school committees in financing management is the management of committee funds which are in the form of donations and strict regulations so that it is difficult to ensure the amount of donations that will be collected. The author suggests that the SMP N 02 Boja Committee increase its involvement in the planning process for all school programs.*

**Keywords:** *Role of School Committee, Education Financing*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis peran komite sekolah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan 2) untuk mengetahui dan menganalisis peran komite sekolah dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan 3) untuk mengetahui dan menganalisis peran komite sekolah dalam pengawasan pembiayaan pendidikan 4) untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh komite sekolah SMPN 2 Boja Kendal dalam pembiayaan pendidikan. Jenis penelitian ini merupakan studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi kegiatan, wawancara dan penelusuran dokumen keuangan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data dengan tiga langkah: reduksi data, menyajikan data, dan menarik simpulan. Hasil penelitian yaitu 1) peran komite dalam perencanaan dengan terlibat mengakomodir program sekolah yang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, serta mensosialisasikan program-program sekolah. 2) peran komite dalam pelaksanaan pembiayaan dengan melakukan penggalangan dana dan

mengelola dana.3) peran komite sekolah dalam pengawasan yang dilakukan komite dalam mengawasi pelayanan pendidikan dan menindaklanjuti kritik dan saran atau aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat belum optimal. 4) kendala utama yang dihadapi komite sekolah dalam manajemen pembiayaan ialah pengelolaan dana komite yang bersifat sumbangan dan ketat aturan sehingga sulit untuk memastikan jumlah sumbangan yang akan terhimpun. Penulis menyarankan agar Komite SMP N 02 Boja meningkatkan keterlibatannya dalam proses penyusunan rencana dalam semua program sekolah

**Kata kunci:** *Peran Komite Sekolah, Pembiayaan Pendidikan*

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat 1).

Begitu pentingnya tujuan pendidikan untuk membangun pribadi serta masyarakat yang memiliki kemampuan dalam membangun suatu bangsa, sehingga diperlukan kesadaran semua kalangan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin membaik dari waktu ke waktu. Upaya yang dapat dilakukan salah satunya ialah dengan meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan investasi pendidikan.

Menurut Agus Irianto (2013: 26) investasi pendidikan menjadi tanggung jawab utama oleh pihak pemerintah, dan bila perlu melibatkan masyarakat selaku objek sekaligus subjek dari pendidikan. Menurut Nanang Fattah (2019: 78) jika kita menempatkan posisi pendidikan sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks Masyarakat madani, diperlukan keberanian investasi yang besar

untuk memperkuat system pendidikan nasional. Karena pendidikan memiliki komponen-komponen yang berkaitan erat dengan biaya, semakin tinggi mutu yang diharapkan maka berimplikasi pada tingginya biaya pendidikan yang diperlukan. Hal ini senada dengan pendapat Jejen Musfah (2015: 77), dipastikan bahwa lembaga pendidikan yang bagus ditopang oleh biaya yang memadai. Pembiayaan pendidikan bertitik tolak pada prinsip-prinsip ekonomi, sehingga sebagian besar analisis ekonomi baik mikro maupun makro dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dalam pembiayaan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 31 tentang pendidikan ayat (2) dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berkaitan dengan UUD tersebut dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 menyatakan bahwa, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Kemudian di pasal 9, masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

dalam pasal 2 menyatakan: Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Merujuk pasal 2 ayat 1 (PP No. 48 Tahun 2008) tersebut, terbuka peluang kerjasama antara pihak sekolah, masyarakat dan pemerintah dalam rangka proses peningkatan mutu pendidikan melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Oleh karena itu menurut E. Mulyasa (2017: 47), dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

Manajemen pembiayaan pendidikan sangat membantu pengelolaan sumber keuangan organisasi pendidikan dalam menciptakan mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan bahwa, pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dari pengertian di atas ada dua aspek penting yaitu sumber dana dan alokasinya yang dikenal dengan biaya. Sumber dan biaya pendidikan merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan di dalam suatu organisasi. Menurut Mulyono (2016: 82), jika suatu kegiatan dilaksanakan dengan biaya yang relatif rendah tetapi dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi maka hal ini

dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien. Artinya, pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana secara efisien.

Makin efisien dana pada sistem pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan yang tidak memerlukan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor Lembaga pendidikan seperti madrasah, baik dikelola oleh pemerintah (negeri) maupun madrasah swasta yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi sehingga proses pembelajaran di sekolah dan berbagai program-programnya dapat terlaksana secara efektif.

Sumber pembiayaan yang secara rutin diterima oleh seluruh sekolah/madrasah di Indonesia kecuali sekolah yang memang tidak menginginkannya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Jejen Musfah (2016: 196), dana BOS tidak mampu menutupi biaya operasional sekolah negeri, apalagi sekolah swasta. Operasional sekolah mencakup pembiayaan buku, seragam, honor guru, listrik, telepon, ujian, ekskul, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. BOS hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan biaya operasional tersebut, sebagian besarnya dibebankan kepada orang tua siswa. Di samping itu menurut Syaiful Sagala (2013: 139), sebenarnya jika diukur dari kemampuan, mungkin

saja sebagian kepala sekolah cukup mampu mengakses dana dari sumber non pemerintah. Tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menanggung risiko, meski pekerjaan itu positif tetapi hasilnya bisa saja mendapat tuduhan negatif karena dianggap tidak legal.

Mengingat pentingnya masalah pengelolaan keuangan dalam pendidikan sehingga Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memosisikannya sebagai salah satu bagian dari delapan standar pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tanpa adanya biaya, maka proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan maksimal, stagnasi, atau bahkan akan menghentikan kegiatan pembelajarannya. Oleh karena itu, setiap Lembaga penyelenggara pendidikan harus mengelola seluruh dana yang telah diterima baik itu bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun yang berasal dari masyarakat.

Salah satu pihak dalam masyarakat yang bersentuhan langsung dengan Lembaga pendidikan ialah para orang tua siswa. Menurut Jon Wiles (2009: 67), *All parents recognize the importance of school for their child's life*. Mereka dapat dianggap sebagai perwakilan para pemakai jasa pendidikan yang dapat mempengaruhi sekolah menjadi lebih efektif. Keterlibatan orang tua merupakan stimulus eksternal yang memainkan peranan penting bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Namun, partisipasi tersebut perlu diatur oleh pemerintah agar tidak menyalahi aturan. Oleh karena itu, munculnya komite sekolah sebagai wadah yang menampung berbagai aspirasi dari para orang tua peserta didik ataupun dari masyarakat luas, hal ini merupakan jawaban dari persoalan pendidikan, khususnya

masalah kekurangan anggaran pendidikan.

Pendapat ini senada dengan Jejen Musfah (2018: 89) yang menyatakan bahwa pelibatan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan sangat diperlukan sehingga kerja sama antara sekolah dan komite berjalan baik, tidak hanya terkait keuangan tetapi aspek-aspek lainnya seperti perkembangan perilaku dan bakat siswa. Keberadaan komite sekolah harus menjadi kekuatan dan faktor pendorong terbentuknya sekolah yang efektif. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila kepala sekolah mampu menggandeng komite sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan serta menilai program-program sekolahnya.

Hal ini senada dengan pendapat Suharto (2012: 24), makin mahal biaya pendidikan sekarang ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang melegalkan kinerja komite sekolah, segala pungutan uang di sekolah selalu berkedok "sesuai keputusan komite sekolah", namun pada tingkat implementasinya ia tidak transparan, komite sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan kepala sekolah.

Menurut E. Mulyasa (2017: 127), pada saat ini kondisi komite sekolah sangat beragam, ada yang memiliki kantor di sekolah, ada yang selalu mengawasi kepala sekolah, bahkan tidak sedikit komite yang hanya mencari makan di sekolah. Hal ini terjadi karena pemahaman kita terhadap komite sekolah sangat beragam. Untuk itu diperlukan kajian mendalam untuk mengungkap seperti apa peran komite sekolah khususnya dalam manajemen pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan sebagai

berikut: 1) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal? 2) Bagaimanakah peran komite sekolah dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal? 3) Bagaimana peran komite sekolah dalam pengawasan pembiayaan pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal? 4) Apa saja kendala yang dihadapi oleh komite sekolah SMPN 2 Boja Kendal dalam pembiayaan pendidikan?

Untuk mengetahui kebaruan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan kajian penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2022) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan komite sekolah terhadap mutu sekolah dengan persamaan  $\hat{Y} = 115,628 + 0,306X_1$ ; kekuatan korelasi sebesar 0,633 dengan kontribusi 14,0%; (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh peran kepala sekolah terhadap mutu sekolah dengan persamaan  $\hat{Y} = 53,962 + 0,629X_2$ ; kekuatan korelasi sebesar 0,567 dengan kontribusi 32,1%; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh pembiayaan sekolah terhadap mutu sekolah dengan persamaan  $\hat{Y} = 85,909 + 0,565X_3$ ; kekuatan korelasi sebesar 0,565 dengan kontribusi 31,9%; (4) ada pengaruh positif dan signifikan komite sekolah, peran kepala sekolah dan pembiayaan sekolah terhadap mutu sekolah dengan persamaan  $\hat{Y} = 28,570 + 0,164 X_1 + 0,385 X_2 + 0,293$

$X_3$  dengan kontribusi variabel independen sebesar 43,2 %

Kemudian Sri Murtiah (2019) Hasil penelitian menunjukkan peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berada pada kategori tinggi, peran komite sekolah sebagai pendukung berada pada kategori tinggi, peran komite sekolah sebagai pengontrol berada pada kategori tinggi dan peran komite sekolah sebagai mediator berada pada kategori tinggi.

Selanjutnya Nili Hayani (2015) Hasil penelitian adalah: (1) peran komite sekolah sebagai pendukung melalui dana, pikiran, dan sarana prasarana sekolah; (2) peran komite sekolah sebagai pengontrol adalah pengawasan pembangunan gedung dan keuangan; (3) peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam pengadaan sarana, prasarana dan dana sekolah. (4) dengan adanya komite sekolah maka hubungan dengan masyarakat dan orang tua siswa dapat terjalin dengan baik.

Dari hasil studi penelitian sebelumnya didapatkan beberapa persamaan dalam analisis peran komite sekolah dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kebaruan pada penelitian ini yakni penulis fokus pada analisis peran komite sekolah dalam pembiayaan pendidikan di SMPN 02 Boja Kendal.

### **Peran Komite Sekolah**

Menurut Hasbullah (2010: 90), pada dasarnya posisi komite sekolah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan

swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite sekolah diharapkan dapat menjembatani kepentingan keduanya.

Menurut Anil Prakash Shrivastava (2018: 141) Pentingnya kualitas partisipasi orang tua dalam pendidikan sehingga hal ini harus diatur dalam peraturan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, pasal 2 ayat: 1) komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan, 2) komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong-royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud immaterial berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif, namun yang lebih dibutuhkan ialah bantuan berupa materi atau dana demi kemajuan suatu sekolah.

Selanjutnya, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, komite sekolah bertugas untuk: a) memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: (1) kebijakan dan program Sekolah; (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan

Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS); (3) kriteria kinerja Sekolah; (4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan (5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain; b) menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; c) mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Sedangkan menurut Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 pada lampiran II bab IV, komite sekolah berfungsi: 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; 4) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas



mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Mulyono (2016: 81), penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu lembaga. Pembiayaan pendidikan mengandung arti ialah sejumlah uang yang berhasil dihimpun dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesionalisme guru, pengadaan sarana ruang belajar siswa, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, kegiatan ekstra kurikuler siswa dan pengadaan buku pelajaran.

Menurut Rohiat (2012: 27), biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Dalam manajemen pembiayaan pendidikan terdapat pemisahan antara fungsi otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang menyebabkan terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan adalah proses menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat kemudian mengalokasikannya untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, dimana proses tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tahapan Manajemen Pembiayaan Menurut Sri Minarti (2011: 213), dalam manajemen pembiayaan sekolah, terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri dari

perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan, dan penggunaan anggaran sekolah. Namun, agar lebih mudah menganalisis tahapannya, maka sebaiknya menggunakan alur yang sudah baku dalam ilmu manajemen.

Menurut Abu bakar dan Taufani/Tim Dosen UPI (2019: 257), manajemen memiliki tahapan penting yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian (evaluasi), ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan menjadi tahap perencanaan keuangan (*budgeting*), tahap pelaksanaan (*accounting*), dan tahap penilaian (*auditing*). Di samping itu, dirangkum dari E. Mulyasa (2013: 198-206), ada tiga tahapan dalam keuangan sekolah, yaitu perencanaan keuangan sekolah, pelaksanaan keuangan, dan evaluasi atau pertanggungjawaban keuangan sekolah.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian ini bertempat di SMP N 2 Boja Kendal. Waktu penelitian ini akan dimulai bulan April sampai dengan Mei 2024. Desain penelitian kualitatif melalui melalui pendekatan kualitatif untuk mengamati dan melihat perilaku dan kejadian dari tempat yang diteliti. Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, komite sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.



Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu model interaktif yaitu menganalisis data dengan empat langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Peran Komite Sekolah Dalam Perencanaan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal**

Berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa komite sekolah mengakomodir program-program sekolah yang tidak bisa dibiayai oleh APBN dan APBD. Sekolah akan menawarkan kepada komite dengan mengundang pengurus komite untuk membahas program sekolah yang tidak di biayai oleh pemerintah dan bisa di back up oleh komite sekolah. Kemudian komite sekolah mensosialisasikan kepada seluruh orang tua siswa tentang program-program yang memang dibutuhkan oleh sekolah.

Pihak sekolah menyusun rencana, kemudian pihak komite yang akan membantu pendanaannya. Pihak komite selalu dilibatkan dalam

penyusunan anggaran (RKAM) dan rapat kerja yang didalamnya memuat kriteria kinerja sekolah yang dijabarkan dalam Laporan Hasil Rapat Kerja setiap awal tahun pelajaran. Keterlibatan ini dibuktikan dengan dokumen daftar hadir peserta Raker dan photo kegiatan yang menunjukkan kehadiran pengurus komite, serta selalu diadakannya rapat pengurus dengan para orang tua siswa yang dilakukan setahun sekali pada awal tahun pelajaran.

#### **2. Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal**

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite untuk menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui Upaya kreatif dan inovatif, serta melaporkan hasil penggalangan dana dan alokasinya.

Kegiatan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya oleh pihak komite sekolah dilakukan setelah komite dan orang tua melakukan pertemuan untuk membahas kegiatan yang akan diselenggarakan dan dibiayai dari dana komite. Pertemuan itu melahirkan ketentuan besaran sumbangan yang akan didukung oleh para orang tua.

### **3. Peran Komite Sekolah Dalam Pengawasan Pembiayaan Pendidikan di SMPN 2 Boja Kendal**

Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa peran komite dalam tahap pengawasan ialah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan, serta menindaklanjuti kritik dan saran atau aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat.

### **4. Kendala-kendala yang dihadapi komite SMP N 2 Boja Kendal**

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat penulis jelaskan bahwa kendala yang paling mendasar bagi pihak komite SMP N 2 Boja Kendal ialah 1) besarnya jumlah tunggakan para orang tua yang sudah membuat komitmen untuk memberikan sumbangan, namun masih belum melakukan pembayaran hingga akhir tahun pelajaran. 2) para orang tua merasa keberatan dengan besarnya sumbangan-sumbangan, termasuk keluhan berkenaan kegiatan di luar. 3) kesibukan pengurus komite menyebabkan jarangya diadakan rapat komite. bahkan dalam setahun hanya satu kali rapat dengan para orang tua di awal tahun ajaran.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peran komite dalam perencanaan dengan terlibat dalam rapat kerja sekolah maupun penyusunan

RKAS. Komite berperan mengakomodir program sekolah yang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, seperti program wajib, program inti dan pembangunan masjid. Pengurus komite mengadakan pertemuan dengan seluruh orang tua siswa untuk mensosialisasikan program-program tersebut untuk dikritisi. Hasil pertemuan akan menghasilkan kesepakatan nominal sumbangan yang akan diberikan oleh orang tua sesuai dengan kesanggupan masing-masing.

- 2) Peran komite dalam pelaksanaan pembiayaan dengan melakukan penggalangan dana dan mengelola dana.
- 3) Peran komite sekolah dalam pengawasan yang dilakukan komite dalam mengawasi pelayanan pendidikan dan menindaklanjuti kritik dan saran atau aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat belum optimal.
- 4) Kendala utama yang dihadapi komite sekolah dalam manajemen pembiayaan ialah pengelolaan dana komite yang bersifat sumbangan dan ketat aturan sehingga sulit untuk memastikan jumlah sumbangan yang akan terhimpun.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan agar:

- 1) Komite SMP N 02 Boja agar meningkatkan keterlibatannya dalam proses penyusunan rencana dalam semua program madrasah terutama program

- yang memerlukan dukungan orang tua.
- 2) Komite SMP N 02 Boja agar melakukan sosialisasi tentang fungsi komite secara utuh kepada orang tua dan peserta didik, agar mereka memahami dan menyadari posisi komite sebagai wadah peningkatan mutu layanan pendidikan yang tidak hanya sebagai penggalang dana tapi juga sebagai sarana yang melakukan tindak lanjut terhadap keluhan, kritik, dan saran dari peserta didik, orang tua, dan masyarakat.
- 3) Komite SMP N 02 Boja hendaknya lebih aktif dalam mengingatkan orang tua yang sudah berkomitmen memberikan sumbangan, agar terbangun rasa kebersamaan dari semua orang tua.
- 4) Komite dan pihak sekolah bekerja sama dalam memperbaiki sistem identifikasi dan klasifikasi status sosial ekonomi orang tua siswa berdasarkan pendapatan orang tua/wali siswa yang selama ini hanya berdasarkan keinginan mereka dalam menandatangani surat pernyataan kesediaan memberikan sumbangan.
- Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irianto, Agus. 2013. *Pendidikan sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*. Jakarta: Kencana.
- Mulyasa, E. 2013. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2017. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono, 2016. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musfah, Jejen. 2015. *Manajemen Pendidikan, Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Prenada Group.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Manajemen Pendidikan, Aplikasi, Strategi, dan Inovasi*. Jakarta: Prenada Group.
- Nili Hayani. 2015. Peran Komite Sekolah Dalam Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajer Pendidikan*. Volume 9, Nomor 2, Maret 2015, hlm. 315-327.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abubakar dan Taufani C. *Kurniatun*. 2019. *dalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan*. (Hal.255-276). Jakarta: Alfabeta.
- Fattah, Nanang. 2019. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*.

- Rohiat. 2012. *Manajemen Sekolah, Teori Dasar dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Sagala, Syaiful. 2013. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Waliyah, Ngasbun Egar, Soedjono. 2022. Pengaruh Peran Komite Sekolah, Peran Kepala Sekolah, dan Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Terhadap Mutu Sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*. Volume 11 Nomor 3 Desember 2022.
- Sri Murtiah, Maisyaroh Desi Eri Kusumaningrum. 2019. *Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Se Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Negeri Malang.
- Wiles, Jon. 2019. *Developing Successful K-8 Schools, A Principal's Guide*. California: Sage.